BAB II

TIJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Konseptual

2.1.1. *Soft Power*

Melalui tulisan Joseph S. Nye diplomasi mengajak dunia untuk membicarakan *national interest* melalui *power* yang terbagi menjadi *soft power, hard power,* dan *smart power* (Nye 2004, 1). *Soft power* didefinisikan sebagai kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi negara lain melalui pesona daya pikat daripada kekuatan seperti dengan *hard power* (Nye, 2008, 95). *Soft power* hanya dapat digunakan ketika pihak lain mengakui upaya tersebut dan memiliki keinginan dan tekad yang sama untuk melaksanaannya guna mencapai tujuan bersama (Nye 2004, 1). Hal ini ditekankan oleh Nye, dimana *soft power* tidak berlaku atau tidak dapat dilakukan ketika pihak yang ingin memerintah dengan paksa menggunakan pengaruhnya (Nye, 2008, 95).

Metode diplomasi publik yang menggunakan *soft power* lebih terkait dengan daya tarik (*attraction*) dan persuasi, tetapi juga mendorong ke arah *social power*. Dimana *social power* mencakup banyak hal, yaitu kemampuan untuk menarik perhatian publik dengan *framing, mempromosikan norma, dan agenda setting* yang dapat mempengaruhi media dan komunikasi (Lock, 2010, 38).

2.1.2. Diplomasi Publik

Dalam artikel *Public Diplomacy: Lessons from the Past* yang ditulis Nicholas J. Cull (2009, 12) yang diterbitkan oleh *University of Southern California*. Diplomasi dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme perang yang digunakan oleh aktor-aktor internasional untuk menguasai panggung internasional. Saat ini, aktor internasional yang bermain tersebut dapat berupa negara, perusahaan multi-nasional, organisasi non-pemerintah, organisasi internasional, organisasi teroris atau kelompok pemberontak atau organisasi semi militer tanpa memiliki kewarganegaraan ataupun aktor-aktor lainnya yang menjadi pemain di panggung internasional. Dalam diplomasi tradisional, diplomasi tersebut akan bersifat internasional dan berisikan upaya aktor untuk menguasai panggung internasional melalui keterlibatan aktor-aktor lainnya. Begitu pula dalam diplomasi publik yang berisikan upaya-upaya aktor internasional untuk menguasai panggung internasional melalui kontak langsung dengan publik asing (Cull, 2009, 12).

Menurut Nicholas J.Cull (2009, 12) Diplomasi publik adalah usaha untuk mempengaruhi opini publik negara lain dengan tujuan untuk dapat berkomunikasi secara efektif dengan publik di seluruh dunia dan untuk memahami, menghargai yang dapat menghasilkan persuasi ataupun kebijakan. Diplomasi publik dipandang sebagai alat *nation branding*, karena dapat digunakan untuk mencapai *national interest* negara melalui *listening, advocacy, cultural diplomacy,*

exchange diplomacy, dan *international broadcasting* (Cull, 2009, 18-22). Jika proses diplomasi tradisional akan dikembangkan melalui mekanisme *G- G*, maka Diplomasi Publik lebih ditekankan pada *G to P* atau bahkan *P-P* yang disebut dengan '*2nd track diplomacy*', yang didefinisikan sebagai upaya diplomasi yang dilakukan oleh non-negara dalam *unofficial transaction* (Cull, 2009, 13). Dalam hal ini bukan berarti menggantikan *1st track diplomacy*, melainkan menjadi pelengkap untuk memfasilitasi kesepakatan, dengan memanfaatkan informasi penting yang diperoleh para pelaku *2nd track diplomacy* (Mapendere, 2005, 68).

2.1.3. Indo Pasifik

Menurut Abhiram Singh Yadav (2022, 1) Indo-Pasifik secara geografis adalah kawasan yang meliputi kawasan Samudra Hindia dan sebagian besar Samudra Pasifik. Dalam perkembangannya di dalam ruang lingkup studi hubungan internasional Indo-Pasifik ditujukan kepada sebuah kerangka kerjasama regional ataupun sebuah *grand strategy* di berbagai bidang yang melingkupi negara-negara di kawasan perairan tropis yakni Samudra Hindia, Pasifik Barat dan Pasifik Tengah. Indo-Pasifik merupakan sebuah kawasan yang terdiri atas China, Jepang, negara-negara Semenanjung Korea, Asia Timur dan Timur Laut, Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, Oseania, Amerika Serikat, Kanada, Meksiko dan negara-negara pasifik di Amerika Latin yang meliputi setengah dari populasi dunia dan sepertiga dari kekuatan ekonomi dunia (Yadav 2022, 21).

Menurut WWF World (*Wide Fund for Nature*) dan Nature Conservancy, Indo-Pasifik terbagi menjadi tiga wilayah yakni *Central Indo-Pacific* (Perairan Kepulauan Indonesia, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Pantai Utara Australia, dan Lautan di sekitar Papua Nugini, Perairan negara-negara Kepulauan Pasifik), *Eastern Indo-Pacific* (mengelilingi sebagian besar pulau vulkanik dari Kepulauan Marchall dibarat hingga pantai barat Chili dan berakhir di Pulau Paskah dan *Isla Salas y Gómez*), dan *Western Indo-Pacific* (Pantai Timur Afrika, Laut Merah, Teluk Aden, Teluk Persia, Laut Arab, Teluk Benggala dan Laut Andaman, juga perairan pesisir yang mengelilingi Madagaskar, Seychelles, Komoro, Mascarene, Maldives, dan Changossa Islands) yang didapat dari pembagian wilayah Indo-Pasifik berdasarkan wilayah biogeografis perairan (Kulbicki,dkk, 2013). Meliputi negara di wilayah Asia Tenggara, Asia Timur, Benua Australia, Negara kepulauan Pasifik seperti Kepulauan Solomon, Vanuatu, Fiji, Kaledonia Baru, dan lainnya.

2.2. Kerangka Teori

2.2.1. Diplomasi Publik

Menurut Cho Yun-Young (2012, 278) Diplomasi publik adalah mekanisme politik dari bawah ke atas, dengan menempatkan masyarakat sebagai kunci atas pembuatan suatu kebijakan luar negeri yang digunakan untuk mewujudkan keuntungan diplomatik berupa peningkatan citra positif negara akibat meningkatkan pengetahuan yang lebih tentang suatu negara yang dapat menghasilkan kebijakan dan persuasi. Hal ini juga termasuk tentang opini publik, interaksi berbagai

kelompok kepentingan, urusan luar negeri, dampak-kebijakan negara, komunikasi antar aktor, terlebih lagi diplomat dan perangkat kenegaraan diluar negeri dan komunikasi antar budaya (Cull, 2009, 20).

Peran diplomasi publik menurut Cho Yun-Young (2012, 280-281), adalah untuk mempromosikan citra suatu negara, membantu membentuk hubungan jangka panjang dengan negara lain dengan berlandaskan kepercayaan, dan mempromosikan pemahaman dan pembenaran kebijakan negara. Di sisi lain, Cho juga menjelaskan bahwa pelaksanaan diplomasi publik harus benar-benar menelaah karakteristik negara penerima agar pesan dapat tersampaikan secara efektif disampaikan oleh negara pengirim. Hal ini ditegaskan oleh pendapat Jay Wang (2006, 42), yang memahami bahwa diplomasi publik memiliiki tiga tujuan utama, yaitu promosi tujuan dan kebijakan pemerintah, bentuk komunikasi nilai dan sarana pemahaman bersama. Menurut Christoper Ross (2003), diplomasi publik dapat dikatakan berhasil apabila memiliki tujuh pilar pemahaman yakni, koordinasi nasional, alasan rasional mendukung kebijakan, pesan konsisten, menghindari kontradiksi, transmisi komunikasi memanfaatkan fasilitas teknologi, memperluas kerjasama, dan menciptakan landasan fondasi kepercayaan dan komitmen. Selain tujuh pilar tersebut, diplomasi publik memiliki tiga level komunikasi yakni tahapan menjual perangkat diplomasi publik terkait kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, tahapan menjual kebijakan dengan menyesuaikan isi kebijakannya, dan

tahapan terakhir adalah penempatan sebagai instrumen kebijakan (Anholt, 2006, 274).

Dari penjelasan diatas maka dengan kata lain diplomasi publik adalah usaha mempublikasikan keberadaannya di masyarakat internasional dengan memanfaatkan perhatian dunia internasional terhadap citra positif negara akibat meningkatnya pengetahuan yang lebih tentang suatu negara yang dapat menghasilkan kebijakan dan persuasi (Cho, 2012, 276). Pada praktiknya diplomasi publik didominasi oleh kegiatan diplomasi budaya. Menurut Choi Jin-Woo (2013, 259), diplomasi budaya adalah cara untuk meningkatkan citra suatu negara dengan mempromosikan keunggulan budayanya di luar negeri dan untuk mewujudkan kepentingan nasional. Diplomasi budaya menjadi kunci utama untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya benturan budaya dan menemukan cara untuk hidup berdampingan dan berkembang melalui pertukaran dan pencampuran budaya. Oleh karena itu, diplomasi budaya dapat mewujudkan kepentingan nasional (Choi, 2013, 260).

Sementara itu, menurut Shin Seung-Jin (2008, 5), diplomasi budaya merupakan upaya lain yang dilakukan beberapa negara untuk mencapai isu-isu nasional non-militer. Urusan nasional ini bertujuan untuk mendapatkan citra positif dari negara lain untuk memfasilitasi kerjasama bilateral antar negara di segala bidang. Hal ini juga diperkuatdengan pernyataan Thomas Jefferson bahwa pertukaran seni

seperti musik, lukisan, patung atau teater dapat menciptakan hubungan baik antar negara (Schneider, 2004, 1).

Diplomasi budaya adalah merupakan contoh utama dari *soft power*. Diplomasi budaya menawarkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh diplomasi lain, karena mampu meyakinkan pihak lain melalui budaya, nilai, dan gagasan, bukan melalui paksaan. Walaupun demikian, diplomasi budaya dapat bekerja di mana *power* masih dapat tersebar ke seluruh dunia dengan bekerja di belakang layar secara perlahan-lahan. Dengan demikian, teori diplomasi publik ini akan sangat bermanfaat dalam menjawab masalah penelitian, dimana ia dapat membantu menjelaskan diplomasi publik Korea Selatan era Moon Jae-In terhadap eksistensi Korea Selatan di *Central* Indo-Pasifik.

2.3. Hasil Penelitian Relevan

Beberapa karya-karya pendahulu yang akan membantu peneliti untuk mengkaji lebih jauh dan dalam terkait dengan problematika pembahasan yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

Tabel 2.1.
Tabel Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis	Judul	Sumber	Hasil
1	Kim Woo-sang (김우상) (2013)	대한민국의 중견국 공공외교 "*Korea's Middle Power Public Diplomacy"*	*Thesis* 연세대학교 (Yonsei University)	Korea abad ke-21 harus melaksanakan diplomasi publik dengan *soft power.* Serta memainkan peran posisi *middle power* Korea Selatan.

2	Joo Mi-Young (주미영) (2015)	글로벌 신뢰국가 이미지 형성을 위한 한국의 공공외교 연구 "*A Study on the Public Diplomacy for Global Trust Korea*"	*정치정보연구 제* (Riset Informasi Politik)	Strategi diplomasi publik melalui '*Global Trust*' memerlukan tujuan yang jelas agar dapat memperoleh efek jangka panjang.
3	Tasha Regina Adriana (2018)	"Diplomasi Publik Korea Selatan sebagai Kekuatan Menengah di Bawah Kepresidenan *Moon Jae In"*	Jurnal Sentris UNPAR	Upaya pemerintahan Moon Jae In menguatkan posisinya sebagai kekuatan menengah mealui diplomasi publik.
4	Sofia Trisni, dkk (2019)	"*South Korean Government's Role in Public Diplomacy: A Case Study of the Korean Wave Boom*"	Andalas Journal of International Studies	Peran pemerintah Korea Selatan dalam hal diplomasi publik dalam pencapaian Korean Wave

2.4. Alur Pikir Penelitian

Gambar 2.4.
Alur Pikir Penelitian

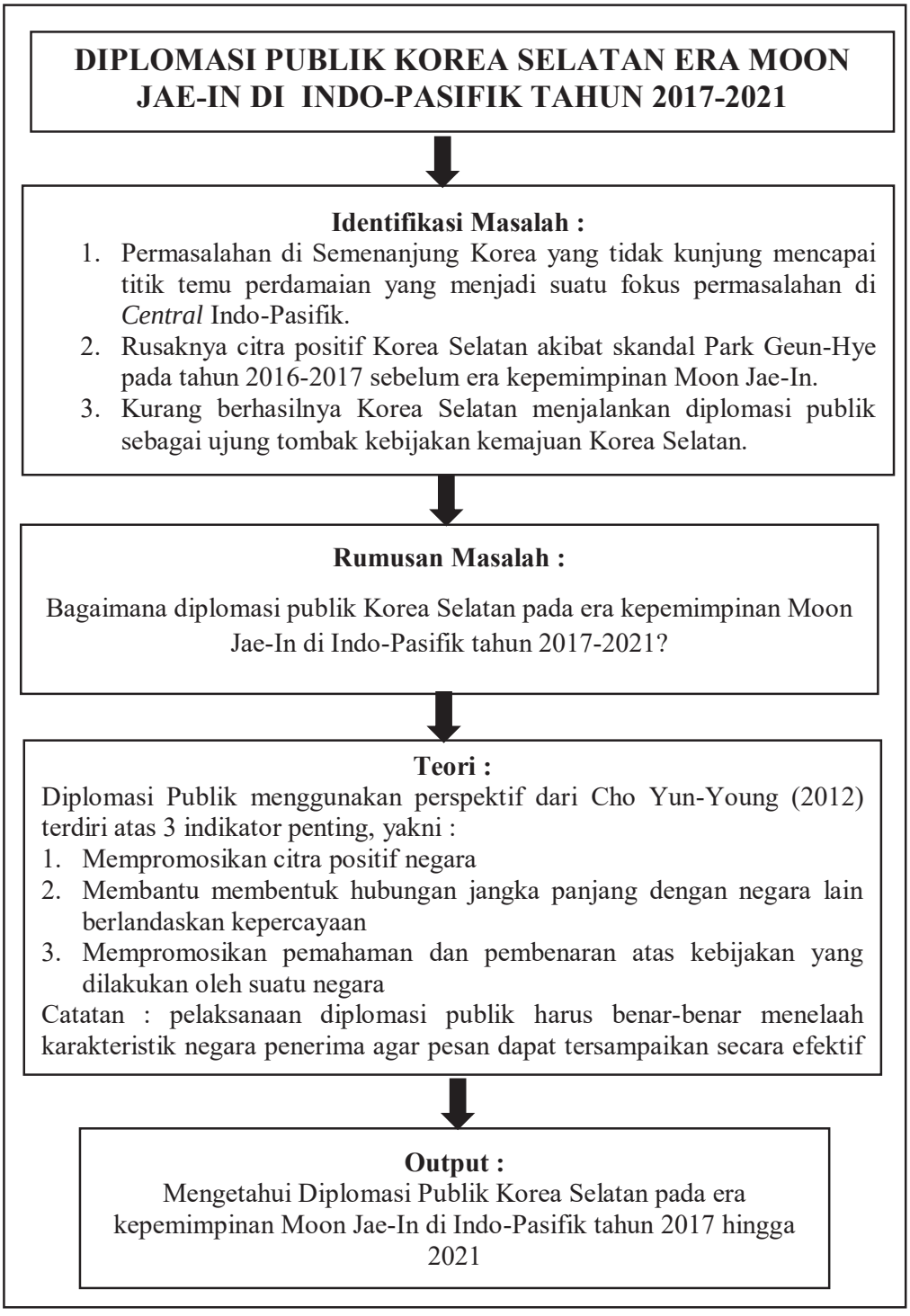

(Sumber: Olahan Peneliti, 2022)

Berdasarkan dari gambar 2.4, dapat dilihat bahwa Korea Selatan menghadapi berbagai kondisi yakni ancaman dan permasalahan di Semenanjung Korea yang tidak mencapai titik temu perdamaian yang menjadi salah satu fokus permasalahan di *Central* Indo-Pasifik, rusaknya citra positif Korea akibat skandal Park Geun-Hye akibat penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi yang dilakukan sebelum kepemimpinan Moon Jae-In, dan kurang berhasilnya Korea Selatan menjalankan diplomasi publik sebagai ujung tombak pembangunan Korea Selatan. Sehingga menimbulkan rumusan masalah "Bagaimana diplomasi publik Korea Selatan era kepemimpinan Moon Jae-In di Indo-Pasifik tahun 2017-2021?". Dalam teori, peran diplomasi publik yang dikemukakan oleh Cho Yun-Young (2012, 280-281) terdapat 3 indikator penting yakni mempromosikan citra negara, membantu membentuk hubungan jangka panjang dengan negara lain berlandaskan kepercayaan, dan mempromosikan pemahaman dan pembenaran atas kebijakan yang diambil oleh negara. Dengan catatan pelaksanaan diplomasi publik harus benar-benar telah menelaah karakteristik negara penerima agar pesan yang ingin disampaikan oleh negara pengirim dapat tersampaikan dengan efektif. Oleh karena itu, teori peran diplomasi publik ini akan membantu mengetahui diplomasi publik Korea Selatan era Moon Jae-In di kawasan *Central* Indo-Pasifik tahun 2017-2021.

2.5. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana diplomasi publik Korea Selatan era Moon Jae-In mempromosikan citra positif Korea Selatan di *Central* Indo-Pasifik 2017-2021?
2. Bagaimana diplomasi publik Korea Selatan era Moon Jae-In membentuk hubungan jangka panjang dengan negara-negara di *Central* Indo-Pasifik dengan berlandaskan kepercayaan?
3. Bagaimana diplomasi publik Korea Selatan era Moon Jae-In mempromosikan pemahaman dan pembenaran atas kebijakan yang dilakukan oleh Korea Selatan?